

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, Indonesia kini sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang merupakan era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber (*fiber technology*) dan sistem jaringan terintegrasi (*integrated network*) sehingga menjadikan era revolusi dengan terobosan yang luar biasa. Untuk dapat bersaing dalam era revolusi industry 4.0 maka kita perlu meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengembangkan kreatifitas yang berbasis pada kekayaan intelektual terkhusus dalam pemerintahan (Kholida Qothrunnada,2022) .

Meningkatnya urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah, memberikan konsekuensi meningkatnya volume urusan daerah, terutama berkenaan dengan pengelolaan aset atau kekayaan daerah. Hal ini dapat dipahami mengingat dengan semakin banyaknya kewenangan yang diserahkan tersebut berarti semakin banyak pula aliran uang dari pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan pusat dan daerah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah daerah memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar segala urusan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan/manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian, dan pemanfaatan serta pengawasan aset daerah (Chabib Soleh & Heru Rochmansjah,2010) .

Barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan meliputi kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan

Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Secara sederhana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi tiga fungsi utama, yaitu: perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efektif dan efisien, dan pengawasan.

Dalam pengelolaan barang milik daerah, perencanaan memiliki peran sebagai manajemen yang memiliki posisi penting, karena perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan barang milik daerah yang memiliki fungsi untuk meramalakan dampak jangka Panjang yang mungkin akan dialami. Oleh karena itu, kematangan atau kesalahan dalam perencanaan berpengaruh terhadap hasil yang mampu memberikan pengaruh positif dan/atau negatif pada saat implementasinya.

Perencanaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan barang milik daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah pada rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Perencanaan barang milik daerah selanjutnya akan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan barang milik daerah.

Dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan agar terlaksana dengan baik dan professional, maka ditunjang dengan penggunaan teknologi informasi di dalam perencanaan barang milik daerah telah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah yang diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 .

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur penunjang pemerintah dalam bidang keuangan dan aset daerah . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menyukseskan jalannya aktivitas pemerintahan daerah serta mewujudkan visi dan misi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat dan juga untuk mencapai sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Untuk mendukung visi dan misi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat mengembangkan suatu program yang disebut Sistem Informasi Perencanaan dan Harga yang disebut dengan SIPAGA.

SIPAGA merupakan aplikasi sistem perencanaan dan harga yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan harga pada barang milik daerah. Dalam mengimplementasikan program aplikasi SIPAGA dibutuhkan sebuah prosedur yang harus dilakukan oleh pegawai dalam bekerja. Disaat bekerja, aparatur sipil negara juga akan menghadapi kendala yang dapat mengganggu dalam mengimplementasikan program SIPAGA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimana pengimplementasian aplikasi SIPAGA pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah BPKAD SUMBAR ?
2. Apa saja hambatan dalam penggunaan aplikasi SIPAGA?
3. Apa saja upaya dalam mengatasi hambatan pada penggunaan aplikasi SIPAGA?

1.3 Tujuan Magang

1. Tujuan Umum

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Meningkatkan dan menerapkan proses pembelajaran melalui praktik sehingga diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang profesional.
3. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam dunia kerja.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat adalah:

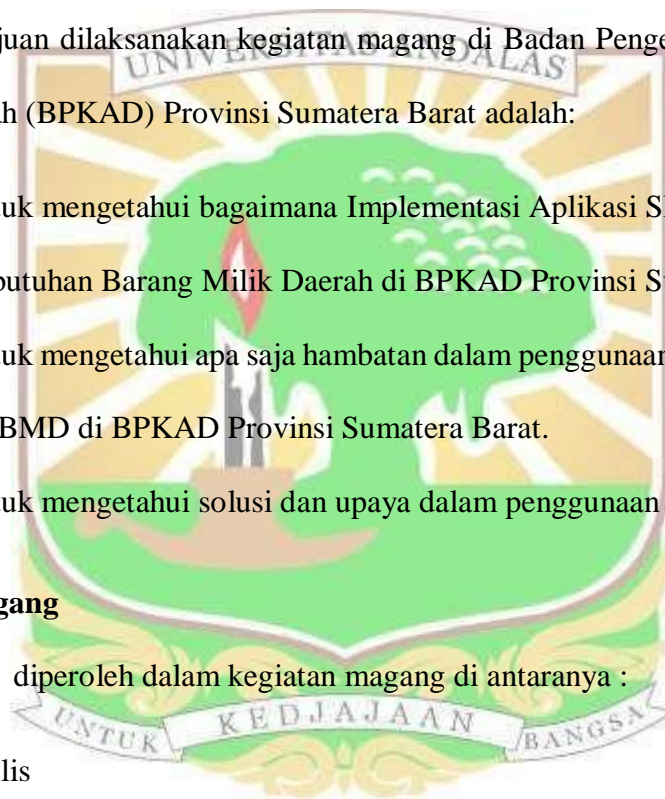
1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Aplikasi SIPAGA pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penggunaan Aplikasi Sipaga pada RKBMD di BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui solusi dan upaya dalam penggunaan aplikasi SIPAGA.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan magang di antaranya :

1. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai pengembangan ilmu penulis mengenai proses pengelolaan keuangan dan aset BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
- b. Melatih keterampilan mahasiswa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari proses perkuliahan dikelas Managemen Aset Daerah.
- c. Sebagai masukan dan langkah awal untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja dan memberikan pengalaman untuk menerapkan



teori yang diberikan selama perkuliahan serta berkontribusi dalam kegiatan operasional perusahaan.

- d. Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan ke dalam praktek kerja yang sesungguhnya.
- e. Mendapatkan pengalaman yang nyata untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.
- f. Salah satu syarat guna menyelesaikan studi program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Instansi Pemerintah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat)

- a. Membina kerjasama antar lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
- b. Dapat meringankan dan membantu kelancaran aktivitas kerja pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat dengan adanya mahasiswa magang.
- c. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BPKAD Provinsi Sumatera Barat dimana tempat penulis melakukan kegiatan magang.
- d. Sebagai wujud partisipasi BPKAD Provinsi Sumatera Barat untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah di Provinsi Sumatera Barat.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku di kampus.
- b. Sebagai bahan referensi dan untuk menambah pengetahuan dan mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset.

4. Bagi Universitas Andalas

- a. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
- b. Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kampus dapat melahirkan lulusan yang memiliki pengalaman kerja untuk dapat bersaing dalam dunia kerja di masa yang akan datang.
- c. Mendorong kemajuan alumni di masa yang akan datang.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode yang dapat penulis jadikan sarana untuk mencari informasi yang berkaitan dengan judul pokok bahasan yang penulis jelaskan diatas, adapun metode yang akan penulis gunakan adalah :

1. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan membaca, mencari, dan mengumpulkan bahan dari buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas penulis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan/ badan yang menjadi objek study sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktek. Adapun teknik penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan pengamatan langsung terhadap operasi instansi/perusahaan yang bersangkutan.
- b. Pengambilan data tertulis dari instansi/perusahaan

c. Melakukan wawancara kepada karyawan di instansi/perusahaan

3. Metode Analisis

Study ini untuk menganalisis teori yang telah diterima dari perkuliahan dengan kenyataan di lapangan untuk mencari letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam pelaksanaan magang ini, penulis melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari kerja, dan penulis memilih tempat instansi magang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertempat di Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 7054536

1.7 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari:

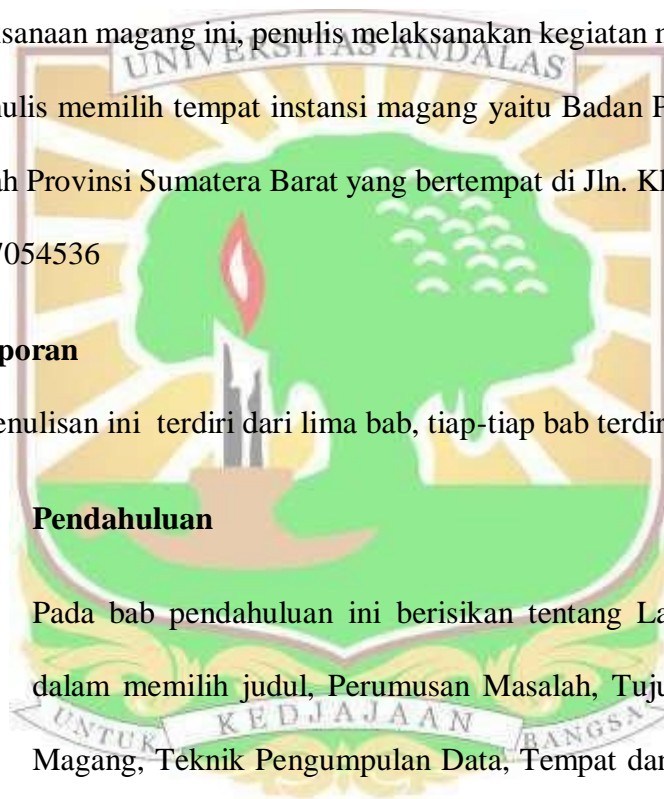
BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penulis dalam memilih judul, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Teknik Pengumpulan Data, Tempat dan Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab landasan teori ini yang membahas tentang prosedur penghapusan barang milik daerah

BAB III Gambaran Umum Instansi



Bab gambaran umum instansi ini berisikan tentang gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, lokasi, tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB IV Pembahasan

Pada bab pembahasan ini membahas tentang prosedur penghapusan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

BAB V Penutup

Pada bab penutup ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas serta saran yang sesuai dengan hasil yang telah dibahas oleh penulis

